

PEMANFAATAN WEBSITE DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MEDAN DALAM MEMBERIKAN INFORMASI PUBLIK

Sultan Haga Purba

NPP. 30.0146

Asdaf Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara

Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan

Email: sultanpurba30@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Ir. Etin Indrayani, MT

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The author focuses on the problem that there are still shortcomings related to the utilization of the website in providing public information by the Communication and Informatics Office of Medan City. **Purpose:** The purpose of this study is to examine the websites owned by regional OPDs to find out the shortcomings of these websites so that researchers can provide suggestions and input by involving the community and related OPDs. **Method:** The research method used is descriptive qualitative research and with data collection techniques using interviews, observation, and documentation. **Result:** From the research conducted by the author, the results obtained are that there are still many shortcomings of the Communication and Informatics Office in running the website provided for the community, one example of an incomplete menu and a budget that has not been fulfilled to run a website and has not realized the search for partners in building a website where the community must take a position to advance the field of informatics, especially in the website and information that will be presented on the website, therefore the reciprocal relationship between the government, the community and stakeholders must go well to increase utilization on a good website and can be said to be a website that is feasible in its usefulness and function. **Conclusion:** The Diskominfo website in the city of Medan has not shown that the website is said to still not meet the standards because it only focuses on updated news but does not create interesting menus and build reciprocal relationships between the Government and the Community but by showing updated news is a step to be better.

Keywords: Website Utilization, Communication and Informatics Office, Public Information

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan tentang masih adanya kekurangan terkait pemanfaatan website dalam pemberian informasi publik oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti website yang dimiliki OPD daerah untuk mengetahui kekurangan dari website tersebut agar peneliti dapat memberikan saran serta masukan dengan melibatkan masyarakat dan OPD terkait. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dan dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, hasil yang diperoleh adalah masih banyaknya kekurangan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menjalankan website yang disediakan untuk masyarakat salah satu contoh dari menu yang kurang lengkap serta anggaran yang belum terpenuhi untuk menjalankan suatu website

serta belum terwujudnya pencarian mitra dalam membangun website dimana masyarakat harus ikut ambil posisi untuk memajukan bidang informatika terutama di bagian website dan informasi yang akan disajikan ke dalam website, oleh karena itu hubungan timbal balik yang dilakukan antara pemerintah, masyarakat dan stakeholder harus berjalan dengan baik untuk meningkatkan pemanfaatan pada website yang baik dan bisa dikatakan sebagai website yang layak secara kegunaannya dan fungsi.

Kesimpulan: Website diskominfo di kota medan belum menunjukkan bahwa website tersebut dikatakan masih kurang memenuhi standart karena hanya terfokus pada berita yang update tetapi tidak membuat menu-menu yang menarik serta membangun hubungan timbal balik antara Pemerintah dan Masyarakat tetapi dengan menunjukkan berita yang update merupakan suatu langkah untuk menjadi lebih baik.

Kata kunci: Pemanfaatan Website, Dinas Komunikasi dan Informatika, Informasi Publik

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Saat ini perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berkembang dengan sangat pesat. Perkembangan ini tentu membawa perubahan yang besar di seluruh aspek kehidupan manusia. Perubahan berpengaruh juga terhadap perubahan kebutuhan masyarakat di suatu negara. Jaringan yang dapat membantu kebutuhan informasi masyarakat mulai bermunculan sebagai akibat dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Internet adalah jaringan yang bermasalah. Kumpulan data atau dokumen tersedia untuk pengguna melalui Internet, jaringan di seluruh dunia yang terdiri dari komputer. (Gibson, 2003). Pada hakekatnya, hak atas informasi merupakan hak yang harus dihormati. Setiap manusia harus memiliki akses terhadap informasi untuk berkembang secara pribadi dan dalam segala aspek kehidupan. Sebuah negara yang demokratis dicirikan dengan informasi yang baik. Informasi yang baik mencerminkan penyelenggaraan negara yang baik pula. Informasi adalah dasar penyampaian pendapat serta gagasan dengan baik dan benar oleh masyarakat. Tanpa adanya informasi yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat maka negara tersebut dikatakan belum berhasil menerapkan prinsip demokratis dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Salah satu yang berperan sebagai bentuk pemenuhan hak oleh warga pemerintah dengan tersedianya. Perkembangan teknologi informasi yang ada tentunya memberikan dampak positif dan negatif juga. Teknologi digital dapat memiliki sejuta manfaat jika digunakan dengan tepat. Internet dapat digunakan untuk mengakses informasi dengan mudah dan cepat, namun juga dapat menciptakan sikap individualisme yang kuat pada manusia karena kurang pedulinya dengan dunia nyata karena terlalu keren dengan dunia maya. Selain itu juga, internet dapat dimanfaatkan untuk mengakses hal-hal yang berbau negatif seperti video yang tidak pantas, dapat juga membentuk perpecahan, ataupun konflik di masyarakat dengan tersebarnya kabar hoax. Bahkan hal yang sering terjadi juga banyak terdapat hacker yang melakukan tindakan buruk dengan megakses data orang lain dan sebagainya. Penting untuk masyarakat dibekali dengan kecerdasan digital agar dapat lebih bijak dalam menggunakan internet. Kurangnya wawasan yang dimiliki oleh masyarakat mengakibatkan perkembangan teknologi yang ada di Indonesia lebih pada arah tidak baik. Pada tahun 2022 pemilik media sosial di Indonesia pada awal tahun setara dengan 68,9 persen dari total masyarakat di Indonesia,

Website merupakan suatu pendukung *e-government* yang dimana pemerintah bisa melakukan pendekatan kepada masyarakat secara tidak langsung yang biasanya pendekatan tersebut dapat memakan waktu yang lama dengan hadirnya teknologi informasi semua nya dapat dilakukan dengan cara singkat dan tidak membutuhkan waktu lama adapun beberapa prinsip good government. Kehadiran media website merupakan salah satu fitur internet yang dapat digunakan. World Wide Web (WWW), juga dikenal sebagai Web, adalah sistem distribusi konten online. Informasi yang dikirim dapat dilihat melalui perangkat lunak yang dikenal sebagai browser, seperti Internet Explorer, Mozilla

Firefox, Opera, dan lain-lain, dan dapat berupa teks, suara (audio), animasi, gambar, bahkan video. Apabila digunakan secara tepat dan benar, website merupakan salah satu manfaat dari kehadiran internet. Website dapat diakses oleh seluruh masyarakat untuk mendapatkan informasi dengan mudah dan cepat. Selain itu dapat pula dilakukan interaksi antara masyarakat dengan pemerintah secara efektif dan efisien,

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan website pemerintah dalam memberikan informasi kepada publik merupakan suatu langkah yang baik untuk memberikan informasi terbaru dan untuk meningkatkan kepedulian rakyat terhadap suatu lingkungan. Salah satu yang merupakan penerapan e-government yang terdapat di Indonesia adalah Web Presence, yaitu memunculkan website di daerah dimana informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dapat dilihat langsung pada website yang dikelola oleh pemerintah daerah. Dan juga dengan adanya website dapat memudahkan rakyat dalam berkomunikasi dengan pemerintah daerah yang dilakukan melalui via internet sehingga sistem komunikasi dapat berlangsung dalam hitungan jam bukan hari atau pun minggu, artinya pelayanan pemerintahan kepada masyarakat menjadi sangat cepat, *service* dan informasi dapat disajikan dalam waktu 24 jam setiap hari, tujuh hari dalam satu minggu. Informasi dapat dicari dari rumah maupun di mobil tanpa harus hadir langsung di tempat. Fungsi ini menurut (Husein, 2008) disebut sebagai pelayanan pemberian informasi secara G2C (*Government to Citizen*) dan fungsi lainnya ada G2B. Efisiensi, kemanfaatan, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah merupakan persyaratan e-government, menurut Inpres No. 3 Tahun 2003. Jika semua persyaratan terpenuhi, maka website dapat dikatakan berkualitas baik dalam kenyataannya pemanfaatan website diskominfo di kota medan belum menunjukkan bahwa website tersebut dikatakan masih kurang memenuhi standart karena hanya terfokus pada berita yang update tetapi tidak membuat menu-menu yang menarik serta membangun hubungan timbal balik antara Pemerintah dan Masyarakat tetapi dengan menunjukkan berita yang update merupakan suatu langkah untuk menjadi lebih baik.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu dalam telaah kebijakan pemerintah dalam pemebrian informasi publik. Penelitian oleh Abubakar (2022) yang berjudul Website Pemerintah Daerah Sebagai Media Pelayanan informasi Publik di Kabupaten Jayapura, menemukan hasil bahwa Walaupun terdapat kendala seperti halaman yang masih belum bisa diakses, pengaduan belum ada yang merespon, dan tampilan website masih basic, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura telah berhasil mengelola website Pemda Kabupaten Jayapura dengan baik. Disarankan SDM Diskominfo memberikan pelatihan teknologi website untuk wilayah Kabupaten Jayapura. Penelitian oleh Batoebara & Hasugian (2021) yang berjudul Pemanfaatan Website Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Mewujudkan Good Governance, menemukan hasil bahwa Keberhasilan indikator kualitas website menunjukkan tingginya standar website pemerintah Kota Pekanbaru. Disarankan untuk menampilkan informasi yang lengkap dan menyertakan tautan ke alamat tambahan bila diperlukan, menyajikan informasi dalam format yang menarik, dan menambah jumlah sumber daya manusia agar pengelolaan website dapat lebih efektif. Peneltian oleh Nio (2021) yang berjudul Efektivitas Penyebaran Informasi publik melalui Website oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngada, menemukan hasil bahwa Untuk mengefektifkan sosialisasi melalui website portal.ngadakab.go.id, anggaran Diskominfo harus ditambah. Selain itu, harus ada aturan khusus yang mengatur kualifikasi dan jumlah admin, serta perbaikan infrastruktur, sosialisasi, dan sumber daya manusia. Penelitian oleh Ibrahim dan Maita (2017) yang berjudul Sistem Informasi Pelayanan Publik Berbasis Web Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kampar, menemukan hasil bahwa rancangan

Sistem Informasi Pelayanan Publik yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan pengaduan terkait kondisi jalan dan jembatan di Kabupaten Kampar. penelitian oleh Melinda (2017) yang berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi Publik Berbasis Web, menemukan hasil bahwa berdasarkan studi yang dilakukan pada pengembangan sistem informasi publik melalui berbagai tahapan, seperti identifikasi masalah, analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi sistem, pengujian sistem, dan pemeliharaan sistem. Fungsi utama dari sistem informasi publik ini termasuk memberikan rincian tentang desa, instruksi tentang cara menyampaikan surat dan pengumuman, pembaruan penting pada program yang sudah ada, dan kemampuan untuk membuat surat yang dibutuhkan masyarakat, seperti Sertifikat Kerugian. (SKTM).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melaksanakan penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya dan belum dilakukan oleh peneliti terdahulu, karena konteks penelitian sebelumnya berpatok pada kebijakan pemerintah dalam memberikan informasi publik kepada masyarakat. Memiliki metode yang sama dengan penelitian Ibrahim dan Maita tetapi menggunakan teori yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori Pemanfaatan Website Dalam Pelayanan Informasi Publik menurut Indrajit (2005). Selain teori, rumusan masalah yang diangkat juga memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Penulis menghubungkan penelitian dengan teori dari pemerintahan dan manajemen pemerintahan yang merupakan sesuai dengan tema fakultas.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan *smart governance* pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor Provinsi Jawa Barat, dan untuk menganalisis apa kendala dalam penerapan *Smart Governance* menuju Bogor *Smart City* pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor Provinsi Jawa Barat.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci, untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan sumber data, memberi nilai pada kualitas data, analisis terhadap data, menafsirkan data yang ada serta membuat kesimpulan atas temuan dalam penelitian (Sugiyono, 2017). Metode kualitatif deskriptif digunakan penulis karena langsung terjun ke lapangan sehingga di rasa lebih tepat. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat memperoleh informasi mengenai pemeberian informasi publik di Kota Medan. Diharapkan juga melalui pendekatan ini dapat menjelaskan serta mengungkapkan kondisi aktual tentang kendala yang dihadapi dalam pemanfaatan website sebagai sarana pemberian informasi publik kepada masyarakat.

Peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan pada penelitian ini ada 5 orang yang diambil dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan, Pegawai dinas sosial, dan masyarakat

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis menggunakan teori Pemanfaatan Website Dalam Pelayanan Informasi Publik. Teori ini didukung dengan enam indikator yang menjadi pusat perhatian yaitu Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stake holder nya baik masyarakat maupun kalangan bisnis dan industri, meningkatkan transparansi, control dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah, mengurangi biaya administrasi relasi dan interaksi, memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber pendapatan baru, menciptakan suatu lingkungan masyarakat informasi yang

dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi, dan memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses. Penulis menghubungkan teoritersebut dengan peraturan-peraturan yang memiliki hubungan terhadap permasalahan yang diteliti. Penyajian subbab juga disusun berdasarkan rumusan masalah yang ada pada penelitian.

3.1. Memperbaiki Kualitas Pelayanan Pemerintah Kepada Stakeholdernya

Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada stakeholdernya adalah dimana para pelayan publik dapat memberikan pelayanan secara cepat, mudah dan ramah kepada masyarakat ataupun pihak-pihak lain. Termasuk dalam pemberian informasi publik melalui website seperti penelitian yang dilakukan oleh si peneliti dengan mewawancarai informan yang telah ditentukan. Untuk memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder seperti masyarakat, bisnis, dan industri harus dilakukan Melakukan evaluasi dan perbaikan - Pemerintah harus terus melakukan evaluasi tentang kualitas layanan yang mereka berikan dan mencari tahu masalah yang mungkin terjadi. Mereka harus siap untuk memperbaiki masalah ini dan terus meningkatkan kualitas layanan mereka serta Meningkatkan keterampilan dan kemampuan - Pemerintah harus memastikan bahwa karyawan mereka memiliki keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk memberikan pelayanan yang baik kepada para stakeholder. Ini bisa dilakukan dengan memberikan pelatihan dan pengembangan karyawan secara berkala.

3.2. Meningkatkan Transparansi, Kontrol, dan Akuntabilitas Penyelenggara Pemerintah

Meningkatkan transparansi, kontrol dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah adalah kegiatan pemenuhan sarana dan prasarana komunikasi informasi untuk mensosialisasikan berbagai kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada masyarakat. Upaya dalam mengontrol penyelenggaraan pemerintah sudah diatur sebaik mungkin dalam perundang-undangan kita namun tentunya kita perlu melakukan revisi dan evaluasi terhadap system control pemerintahan yang di jalankan selama ini, dengan kata lain segala celah yang memungkinkan kecurangan harus ditambal dengan peraturan terbaru yang lebih relevan. Perlunya peningkatan Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam mengoperasikan dan menciptakan infrastruktur bidang komunikasi dan informasi yang mampu dijangkau oleh setiap orang dan user friendly.

3.3. Mengurangi Biaya Administrasi Relasi dan Interaksi

Mengurangi biaya administrasi relasi dan interaksi bertujuan untuk pembentukan jaringan dan transaksi layanan public yang tidak dibatasi sekat waktu dan lokasi, serta dengan biaya yang terjangkau masyarakat di lapis ekonomi manapun. Upaya dalam mengurangi biaya administrasi relasi dan interaksi sudah tepat dengan memanfaatkan internet dan teknologi terbaru karena dengan demikian secara kasarnya pemerintah tidak lagi mengeluarkan biaya untuk kertas, print, bahkan tinta untuk suatu berkas yang dapat dilihat dan diedit oleh semua orang. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi biaya administrasi relasi dan interaksi, di antaranya Menggunakan teknologi yang tepat: Teknologi dapat membantu mengurangi biaya administrasi relasi dan interaksi, seperti menggunakan aplikasi atau software manajemen hubungan pelanggan (CRM) untuk mengelola data pelanggan atau menggunakan alat kolaborasi online untuk bekerja dengan tim secara efisien.

3.4. Memberikan Peluang Bagi Pemerintah Untuk Mendapatkan Sumber Pendapatan Baru

Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber pendapatan baru bertujuan untuk mendapatkan kas masuk namun secara bersamaan memberikan manfaat bagi masyarakat serta pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pemerintah harus mampu memajemen pemerintahan dengan memanfaatkan berbagai kemudahan yang ada. Dalam hal ini pemerintah telah melayani masyarakat

melalui aplikasi yang kita desain sedemikian rupa, Disamping melayani pemerintah juga mampu meraup keuntungan sebab semakin banyak yang mendownload aplikasi tersebut maka semakin besar pula keuntungan yang di raup selain itu masyarakat juga mampu berbisnis dengan mudah apabila informasi daerah tempat tinggalnya muadah di akses sehingga nantinya dapat meningkatkan pendapatan daerah tersebut. Informasi yang beragam dan lengkap merupakan salah satu kunci utama dalam menciptakan peluang besar untuk meningkatkan sumber daya alam suatu daerah begitu juga dengan sumber daya manusia nya sehingga kita berharap tidak ada ketimpangan yang terjadi antar daerah. Pemerintah dapat melakukan investasi pada sektor-sektor yang menguntungkan, seperti infrastruktur, energi, dan teknologi. Dengan melakukan investasi yang tepat, pemerintah dapat mendapatkan keuntungan jangka panjang dan meningkatkan perekonomian serta pemerintah dapat menjual saham atau aset milik negara kepada investor swasta. Dengan demikian, pemerintah dapat memperoleh dana segar untuk membiayai program-program pembangunan.

3.5. Menciptakan Suatu Lingkungan Masyarakat Informasi Yang Dapat Secara Cepat dan Tepat Menjawab Berbagai Permasalahan Yang Dihadapi

Menciptakan suatu lingkungan masyarakat informasi bermaksud memudahkan masyarakat dalam menanggulangi beragam masalah yang ada di lingkungan masyarakat serta menjadi bahan pertimbangan dalam penyelesaian masalah. Sejauh ini pemerintah masih harus dievaluasi sebab masih di dapati masyarakat yang terkendala mendapatkan jawaban atas permasalahannya dikarenakan administrasi yang rumit dengan kata lain masih lambat selain itu perlu dilakukan peningkatkan literasi informasi masyarakat. Hal ini akan membantu masyarakat untuk memahami bagaimana memanfaatkan informasi dengan benar dan efektif. Pemerintah semestinya mendorong kolaborasi antar lembaga Pemerintah atau lembaga terkait dapat mendorong kolaborasi antar lembaga untuk membagikan informasi secara terbuka dan transparan. Kolaborasi ini dapat berupa kerja sama antara pemerintah, organisasi non-profit, universitas, dan sektor swasta untuk menyelesaikan masalah yang kompleks.

3.6. Memberdayakan Masyarakat Dan Pihak-Pihak Lain Sebagai Mitra Pemerintah Dalam Proses Pengambilan Berbagai Kebijakan Publik Secara Demokrasi

Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah adalah salah satu cara untuk membuka peluang keuntungan dengan pihak luar dan juga menambah pengetahuan lewat komunikasi dan informasi. inti dari semuanya adalah komunikasi yang terbuka bagi pihak luar maupun pihak dalam sehingga setiap orang yang tegabung didalamnya dapat secara cepat mengetahui dan menentukan pilihannya kemudian Memberikan akses informasi yang transparan dan terbuka mengenai proses pengambilan kebijakan publik dan data yang diperlukan. Dengan demikian, masyarakat dan pihak lain akan memiliki informasi yang cukup untuk memberikan masukan dan mempengaruhi kebijakan yang diambil. Pemberdayaan secara terbuka dapat menambah peluang kota Medan untuk menjalin kerja sama. Semakin banyak kerja sama yang dilakukan maka semakin majulah daerah tersebut karena setiap kerja sama tentu memiliki tujuan yang dicapai selain itu melibatkan masyarakat dalam konsultasi dan informasi juga penting untuk mendengarkan pandangan masyarakat dan pihak-pihak terkait dalam proses pengambilan keputusan. Ini dapat dilakukan melalui konsultasi publik atau forum diskusi terbuka. Dalam forum ini, pemerintah dapat mendapatkan masukan yang berharga dari masyarakat dan pihak-pihak

3.7. Diskusi Temuan Utama Penelitian

masih banyak terdapat masyarakat yang tidak mampu atau melek dalam menggunakan aplikasi dan kemudahan dari pemerintah untuk mengontrol penyelenggaraan pemerintah sehingga kami berharap pemerintah harus lebih effort dalam mensosialisasikan betapa berpengaruhnya website dalam pemberian informasi publik. untuk meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah harus ada Publikasi Informasi - Pemerintah secara aktif mempublikasikan informasi tentang program, kebijakan, dan pengeluaran mereka, baik secara online maupun offline kemudian diadakan Pertemuan Terbuka dan memberikan kesempatan kepada publik untuk memberikan masukan dan saran tentang kebijakan dan program mereka serta terakhir ada pemantauan Independen oleh organisasi masyarakat sipil, media, dan warga negara. pemerintah sudah berhasil menekan biaya pengeluaran namun masih terdapat biaya keluar yang tidak jelas asal dan tujuannya, oleh karena itu perlu evaluasi lebih dalam pengarsipan kas yang masuk dan keluar selain itu perlu Automatisasi sistem di dalam organisasi, Ini dapat mencakup penggunaan software CRM (Customer Relationship Management) atau HRM (Human Resource Management) untuk mengelola hubungan dengan pelanggan dan karyawan, penggunaan alat digital untuk pengumpulan dan pengolahan data, dan sebagainya. Dengan mengotomatisasi beberapa tugas administrasi, pemerintah dapat menghemat waktu dan uang yang biasanya dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut secara manual. segala upaya telah dilakukan dan kedepannya saya harap masyarakat dan pemerintah mampu bekerja sama untuk menciptakan tata Kehidupan Negara yang lebih transparan dengan memiliki rasa saling peduli terhadap administrasi negara sebab administrasi negara yang baik memudahkan kita menuju tujuan negara. Selain itu yang menjadi Pertimbangan adalah untuk mengadopsi teknologi baru seperti layanan cloud, aplikasi mobile, atau media sosial untuk mempercepat dan mempermudah interaksi dan komunikasi dengan pelanggan atau karyawan. Hal ini akan memungkinkan pemerintah untuk menghemat waktu dan biaya yang biasanya diperlukan untuk bertemu secara langsung atau mengirimkan surat resmi. system pemerintahan di kota Medan masih cukup kaku dan inilah yang menyebabkan masyarakat sukar untuk mendapatkan jawaban atas permasalahannya. Kita berharap sistem pemerintahan kota Medan dapat menciptakan sistem regulasi yang lebih sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat luas.

3.8. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat dalam pemanfaatan website sebagai sarana pemverian informasi publik yaitu adanya beberapa tantangan teknologi yang dihadapi nfrastruktur telekomunikasi yang terbatas dan tidak merata di seluruh Indonesia menjadi salah satu tantangan teknologi yang dihadapi Kominfo. Hal ini menyebabkan akses internet dan jaringan komunikasi yang lambat atau bahkan tidak tersedia di daerah tertentu selain itu keamanan siber menjadi semakin penting karena semakin banyaknya serangan siber yang terjadi di seluruh dunia.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis laksanakan di Kota Medan dapat ditarik kesimpulan bahwa Website diskominfo di kota medan belum menunjukkan bahwa website tersebut dikatakan masih kurang memenuhi standart karena hanya terfokus pada berita yang update tetapi tidak membuat menu-menu yang menarik serta membangun hubungan timbal balik antara Pemerintah dan Masyarakat tetapi dengan menunjukkan berita yang update merupakan suatu langkah untuk menjadi lebih baik. masi mempunyai kekurangan seperti link layanan pengaduan dan menu menu yang masih belum lengkap oleh karena itu di halaman website suatu Organisasi Perangkat Daerah haruslah memenuhi standart yang telah dibuat oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan juga perlunya sosialisasi yang dilakukan oleh Diskominfo Kota Medan dalam hal untuk membangun mindset masyarakat agar lebih mempunyai rasa peduli terhadap informasi publik.

Keterbatasan Penelitian. Dalam penelitian ini masih terdapat keterbatasan utama yaitu pada keterbatasan waktu yang dimiliki oleh penulis dalam mengumpulkan data dan informasi. Keterbatasan ini menyebabkan data dan informasi yang didapatkan penulis belum bisa untuk melengkapi keseluruhan aspek dari penelitian yang dilaksanakan

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis mengharapkan untuk penelitian kedepannya yang mengambil permasalahan yang sama dan tempat yang sama agar melakukan penelitian secara mendalam dan menyeluruh di semua aspek yang terkait di Kota Medan, karena penulis menyadari dari hasil temuan penelitian ini yang masih tergolong awal.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing serta Dosen Penelaah yang telah mengambil andil untuk memberikan saran dan masukan dalam pelaksanaan penelitian ini. Terima kasih kepada seluruh informan penelitian yang telah bersedia untuk meluangkan waktu dan memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan penulis selama pelaksanaan wawancara, serta seluruh pihak yang telah membantu dalam menyukseskan pelaksanaan penelitian. Terima kasih.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, A. (2022). *Website Pemerintah Daerah Sebagai Media Pelayanan Informasi Publik di Kabupaten Jayapura*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Batoebara, M. U., & Hasugian, B. S. (2021). Komunikasi Romantisme Masa Pandemi Melalui Sosial Media. *Jurnal Netwoek Media*, 4(1), 44–50.
- Melinda, M., Borman, R. I., & Susanto, E. R. (2017). Rancang Bangun Sistem Informasi Publik Berbasis Web (Studi Kasus : Desa Durian Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran). *Jurnal Tekno Kompak*.
- Nio, M. S. C. L. (2021). Efektivitas Penyebaran Informasi Publik Melalui Website oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngada. *Institut Pemerintahan Dalam Negeri*.
- Ibrahim, W. H., & Maita, I. (2017). Sistem Informasi Pelayanan Publik Berbasis Web pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kampar. *Jurnal Ilmiah Rekayasa Dan Manajemen Sistem Informasi*, 3(2).
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.